

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN LITERASI SEKOLAH DI SMA NEGERI 2 BANTUL

Anjar Siswo Saputro

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
Program Studi Magister Manajemen Pendidikan
anjarsiswo85@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan mendeskripsikan kebijakan gerakan literasi sekolah di SMA Negeri 2 Bantul, implementasi berdasarkan 4 isu pokok Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, komitmen, dan struktur birokrasi serta akan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan gerakan literasi sekolah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 2 Bantul selama bulan Januari 2018-Maret 2018. Subjek penelitian ialah Kepala Sekolah, Kepala Perpustakaan, Koordinator literasi, guru serta siswa kelas X. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Serta dilakukannya triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan keabsahan data.

Hasil penelitian ialah sebagai berikut: (1). Gerakan literasi sekolah dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu pembiasaan membaca, pengembangan minat baca, dan pembelajaran berbasis literasi. Keberhasilan program ini tidak lepas dari partisipasi warga sekolah dan masyarakat sekitar. Gerakan waqaf buku, perjanjian kerjasama dengan berbagai instansi, dan pemberian penghargaan merupakan upaya-upaya yang dapat di tempuh untuk mensukseskan gerakan literasi sekolah. Di samping itu pengimbasan pada sekolah di sekitar merupakan upaya untuk melebarkan sayap literasi ke setiap jenjang pendidikan.

Sebagai sekolah budaya, festival literasi dapat dikemas bersama dengan apresiasi budaya dan seni sehingga memberikan kesempatan kepada siswa untuk memvisualisasikan gerakan informasi dari buku yang dibacanya melalui kegiatan lomba penulisan cerpen, lomba resensi, lomba cipta dan baca puisi, musikalisasi puisi dan tidak kalah penting lomba perpustakaan kelas. Untuk meningkatkan

semangat para siswa, penghargaan duta literasi diberikan pada siswa yang paling banyak membaca buku dalam periode tertentu; (2). implementasi kebijakan ini kemudian didukung oleh a). Komunikasi agen-agen pelaksana melalui rapat elemen sekolah seperti manajemen, orangtua, dan guru; b). Sumber daya yang mendukung kegiatan ini seperti adanya potensi guru, orangtua, sekolah, dan pemerintah serta masyarakat; c). Komitmen dari para agen pelaksana; d). Struktur birokrasi baik dari pihak sekolah; (3). Faktor pendukung berupa tersedianya sarana untuk mensosialisasikan kebijakan, peran dari orangtua dan guru, waktu dan dana, guru-guru yang mempunyai semangat belajar, mahasiswa PPL juga membantu dalam pelaksanaan program-program perpustakaan, serta semua warga sekolah terlibat aktif dalam program yang dibuat sekolah. Sedangkan faktor penghambatnya guru masih harus diingatkan terkait SOP yang mengacu pada buku panduan gerakan literasi sekolah, buku yang kaya akan nilai pendidikan serta informasi aktual yang menarik sulit didapatkan di Indonesia.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Gerakan Literasi, Sekolah*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan yang paling hakiki dari sebuah proses pendidikan pada hakikatnya adalah usaha untuk dapat memanusiakan manusia. Artinya dengan proses transformasi pendidikan, manusia dapat meningkatkan seluruh potensi kognitif, afektif dan psikomotornya. Selama proses pendidikan, peserta didik memperoleh bekal penguasaan

berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan keterampilan fungsional. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke 4, bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hadirnya kurikulum 2013 di Indonesia adalah sebuah upaya pembangunan atau perubahan yang signifikan dalam menjadikan kondisi pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik dalam penataan pola pikir, pendalaman dan perluasan materi hingga berbagai elemen seperti SKL, standar isi, standar proses, standar penilaian hingga pendekatan dalam pembelajaran.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 4 ayat 5 menyatakan bahwa “prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap masyarakat. Dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 3, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa”. Artinya pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi warga negara Indonesia agar cerdas secara intelektual dan sosial. Salah satu indikator capaian keberhasilan proses pendidikan adalah dengan meningkatnya angka melek huruf pada warga negara Indonesia.

Dalam rangka mencapai target tersebut, Susilo Bambang Yudoyono menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Pada Tahun 2015 penuntasan buta aksara Indonesia telah melebihi target yaitu lebih dari 95% sedangkan penduduk Indonesia yang masih buta aksara sekitar 3,56% atau 5,7 juta. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia telah melewati tahapan krisis literasi dalam pengertian kemelekhurufan (Antoro, 2017 : 15).

Selain itu, ketersediaan buku yang belum memadai serta rendahnya motivasi membaca di kalangan peserta didik menjadi masalah yang memprihatinkan karena di era teknologi informasi, peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan membaca dalam pengertian

memahami teks secara analitis, kritis dan reflektif. Terkait dengan buku sebagai salah satu sumber informasi, rendahnya minat dan gairah membaca sebagian berakar dari masih kuatnya tradisi lisan dalam kehidupan sosial dan pola berpikir masyarakat Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2006 (Suragangga, 2017 : 156) menunjukkan 85,9% masyarakat memilih menonton televisi daripada mendengarkan radio (40,3%) dan membaca koran (23,5%). Masyarakat Indonesia belum terbiasa melakukan sesuatu berdasarkan pemahaman dari membaca. Masyarakat Indonesia belum dapat mengaktualisasikan diri melalui tulisan. Membaca dan menulis belum menjadi budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Masyarakat lebih familiar dengan media visual (menonton), verbal (lisan) atau mendengar dibandingkan membaca, apalagi menulis.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh IEA (data PIRLS) tahun 2011, menunjukkan tingkat literasi membaca di kalangan siswa Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari posisi Indonesia yang berada pada peringkat ke 45 dari 48 negara peserta dengan skor 428 (skor rata-rata 500) (Sulistyo, 2017 : 49).

Selanjutnya, uji literasi membaca menurut data PISA 2009 menempatkan Indonesia pada peringkat ke 57 dengan skor 396 (skor rata-rata 493), sedangkan data PISA 2012 posisi Indonesia berada pada peringkat ke 64 dengan skor 396 dari rata-rata skor OECD 496, sebanyak 65 negara berpartisipasi dalam PISA 2009 dan 2012. Data PISA 2015 juga belum menunjukkan tingkat literasi yang signifikan yaitu sebesar 1 poin dari skor 396 di tahun 2012 menjadi 397 di tahun 2015. Peningkatan tersebut mengangkat posisi Indonesia 6 peringkat ke atas (peringkat 62 dari 70 peserta) bila dibandingkan posisi peringkat kedua dari bawah pada tahun 2012 (OECD, 2015). OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) merupakan organisasi internasional yang *concern* pada perkembangan dunia pendidikan internasional. OECD secara periodik melakukan *Programme for International Student Assessment (PISA)* setiap tiga tahun sekali (Asyhari dan Hartati, 2015 : 179).

Subtansi yang ditekankan terkait dengan teks pengalaman kesastraan dan pemerolehan serta penggunaan informasi. Komposisinya teks sastra 50% dan teks informasi 50% dengan rincian 20% difokuskan pada informasi yang dinyatakan secara tersurat untuk diulang, 30% membuat inferensi, 30% menafsirkan dan memadukan gagasan dan informasi, serta 20% memeriksa dan menilai isi, bahasa, dan unsur-unsur yang terdapat di dalam teks (Suryaman, 2015 : 171).

Sejumlah media massa nasional melansir survei Unesco pada tahun 2012 menunjukkan indeks membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang membaca serius. Kondisi ini mendorong pemerintah melakukan perubahan pada fokus pemberantasan buta aksara. Pemerintah yang sejak puluhan tahun berkonsentrasi pada pengentasan buta aksara (baca-tulis-hitung), mulai mengubah fokus sesuai dengan pengertian literasi yang digunakan dalam survei PISA. Perubahan fokus kebijakan pendidikan yang mengarah pada kecakapan abad ke-21 (literasi, kompetensi, dan karakter) diformulasikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. (Antoro, 2017 : 6).

Dalam upaya menumbuhkan budi pekerti siswa, pemerintah meluncurkan sebuah gerakan yang disebut Gerakan Literasi Sekolah. Gerakan ini bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis sehingga tercipta pembelajar sepanjang hayat. Salah satu kegiatan di dalam gerakan tersebut adalah kegiatan 15 menit membaca buku non pelajaran sebelum waktu belajar dimulai. Banyak tanggapan dan kritik mengenai Gerakan Literasi Sekolah ini tidak bisa efektif dalam membantu meningkatkan budaya literasi siswa.

Namun hal tersebut berbeda dengan kondisi di SMA Negeri 2 Bantul. Terletak di Jalan R.A Kartini Trirenggo Bantul, SMA Negeri 2 Bantul merupakan sekolah favorit masyarakat. Sekolah yang banyak menyandang predikat, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional ini di antaranya sebagai sekolah sehat, sekolah adiwiyata, sekolah responsif gender, sekolah budaya, dan sekolah

siaga bencana merupakan pelopor gerakan literasi sekolah di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Gerakan Literasi Sekolah sebagai gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai elemen merupakan upaya yang ditempuh untuk mewujudkan pembiasaan membaca peserta didik.

Gerakan Literasi Sekolah diharapkan dapat memperkuat penumbuhan budi pekerti sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. Tahapan pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah adalah penumbuhan kegiatan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca, meningkatkan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan dan meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran dengan menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran.

Gerakan literasi sekolah dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu pembiasaan membaca, pengembangan minat baca, dan pembelajaran berbasis literasi. Keberhasilan program ini tidak lepas dari partisipasi warga sekolah dan masyarakat sekitar. Gerakan sedekah buku, perjanjian kerjasama dengan berbagai instansi, dan pemberian penghargaan merupakan upaya-upaya yang dapat di tempuh untuk mensukseskan gerakan literasi sekolah. Di samping itu pengimbasan pada sekolah di sekitar merupakan upaya untuk melebarkan sayap literasi ke setiap jenjang pendidikan.

Sebagai sekolah budaya, festival literasi dapat dikemas bersama dengan apresiasi budaya dan seni sehingga memberikan kesempatan kepada siswa untuk memvisualisasikan gerakan informasi dari buku yang dibacanya melalui kegiatan lomba penulisan cerpen, lomba resensi, lomba cipta dan baca puisi, musikalisasi puisi dan tidak kalah penting lomba perpustakaan kelas. Untuk meningkatkan semangat para siswa, penghargaan duta literasi diberikan pada siswa yang paling banyak membaca buku dalam periode tertentu.

Hal tersebut merupakan komitmen bersama warga SMA Negeri 2 Bantul dalam melaksanakan kebijakan Gerakan Literasi Sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan budaya membaca dan menulis siswa. Oleh karena itu, peneliti tertarik

untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SMA Negeri 2 Bantul” untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan tersebut dan mengetahui faktor yang mendukung serta menghambat terlaksananya program.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang serta identifikasi masalah yang telah dilakukan diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 2 Bantul ?
2. Apa saja faktor pendukung implementasi kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 2 Bantul ?
3. Apa saja faktor penghambat implementasi kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 2 Bantul ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 2 Bantul.
2. Mengetahui faktor pendukung implementasi kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 2 Bantul.
3. Mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 2 Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan atau rekomendasi bagi warga sekolah dalam meningkatkan minat baca dan budaya literasi pada siswa.

Bagi Pemerintah dapat menjadi sekolah model terkait implementasi kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di Indonesia. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mendidik generasi muda dalam menumbuhkan budaya membaca.

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah khasanah keilmuan bagi penelitian terkait implementasi kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di SMA N 2 Bantul

khususnya dalam bidang pendidikan dan kebijakan, mulai dari perencanaan sampai implementasinya.

II. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Suharsimi (2005: 234) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Bogdan dan Taylor (1975) sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong (2005: 4) mendefinisikan metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan makna dibalik fenomena yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti sebagai subjek penelitian. Penelitian ini akan mendeskripsikan “Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 2 Bantul”. Dari hasil penelitian akan diperoleh data-data tentang “Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 2 Bantul.

B. Setting Penelitian

Setting dalam penelitian ini adalah di SMA Negeri 2 Bantul yang terletak di Jl. Ra. Kartini, Trirenggo, Kecamatan Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti akan berfokus pada jenjang sekolah menengah tingkat bawah (kelas X) karena pada tingkatan ini adalah tahap untuk menumbuhkan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran berbasis literasi kepada siswa. Penelitian ini dilaksanakan bulan Januari 2018 sampai dengan Maret 2018. Penentuan waktu mempertimbangkan fokus penelitian dan kemampuan peneliti dalam menginterpretasikan sebuah makna dibalik fenomena. Dengan penjabaran proses penelitian dimulai dari koordinasi dengan pihak sekolah baik kepala sekolah, guru, karyawan dan warga di lingkungan

sekolah dilanjutkan dengan melakukan tahap observasi pertama, observasi kedua, dan seterusnya kemudian diakhiri dengan pemeriksaan hasil penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi subyek penelitian adalah warga sekolah yang meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator literasi, kepala perpustakaan, guru dan beberapa siswa kelas X dan yang telah ditentukan sebagai subjek dalam penelitian. Sedangkan obyeknya adalah gejala sosial dan interaksi sosial yang menggambarkan makna dibalik fenomena implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data lapangan peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang biasa disebut dengan triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada (Sugiyono, 2007: 194). Teknik pengumpulan data berupa:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan semi struktur, yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya, dan ide-idenya. Wawancara dilakukan pada sebagian anggota di sekolah seperti kepala sekolah, kepala perpustakaan, guru dan subjek penelitian lainnya untuk menggali informasi terkait implementasi gerakan literasi di sekolah. Peneliti mewawancarai kepala sekolah tentang implementasi gerakan literasi di sekolah. Peneliti juga mewawancarai kepala perpustakaan, guru dan siswa untuk menggali informasi peran mereka dalam pengimplementasian kebijakan tersebut.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati implementasi kebijakan gerakan literasi yang

berkembang di sekolah, artefak yang mendukung, maupun tentang program-program yang menunjang. Peneliti menggunakan observasi partisipatif aktif yaitu observasi yang diikuti oleh peneliti sesuai apa yang dilakukan oleh narasumber tetapi belum sepenuhnya lengkap.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data mengenai implementasi gerakan literasi di sekolah. Dokumentasi ini berupa dokumen, foto, video, dan data-data yang ada di sekolah. Dokumentasi tersebut digunakan sebagai suatu bukti data yang mendukung pengamatan peneliti lapangan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen dari penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* memiliki fungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari temuannya (Sugiyono, 2013). Namun peneliti juga menggunakan pedoman dalam mengumpulkan sebuah data. Baik itu pedoman wawancara maupun pedoman studi dokumen yang membantu peneliti dalam mengumpulkan data lapangan. Oleh karena itu, peneliti menyusun kisi-kisi instrumen untuk menjadi landasan dan membantu peneliti dalam pengumpulan data

F. Teknik Analisis Data

Data penelitian dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan model kualitatif dari Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007: 337) sebagaimana lazim digunakan adalah:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Peneliti memilih data yang relevan, penting dan bermakna, dan data yang tidak berguna, untuk menjelaskan apa yang menjadi sasaran analisis. Lalu menyederhanakan dengan membuat fokus, klasifikasi, dan abstraksi data.

2. Sajian Deskripsi Data (*Data Display*)
Menyajikan data secara deskriptif tentang apa yang ditemukan dalam analisis. Sajian deskriptif dapat diwujudkan dalam narasi. Alur sajiannya sistematis.
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion/Verification*)
Penarikan kesimpulan atas apa yang disajikan merupakan intisari dari analisis yang memberikan pernyataan.

G. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan sebuah data, diperlukan teknik dalam pemeriksaan yang didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Lexy J. Moleong (2005: 330) ada 4 kriteria yang dapat digunakan untuk menetapkan keabsahan data: 1) Kredibilitas, 2) Transferabilitas, 3) Dependabilitas, 4) Confirmabilitas. Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data dalam menguji kredibilitas data. Lexy J. Moleong juga menjelaskan triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode dan sumber data. Triangulasi metode menekankan penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda pada sumber data yang sama untuk menguji kemantapannya. Cara yang dilakukan dapat dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara serta studi dokumentasi yang dilakukan. Sedangkan triangulasi sumber menekankan penggunaan metode yang sama pada sumber yang berbeda. Cara yang dilakukan untuk memastikan keabsahan data dengan triangulasi sumber adalah menggunakan teknik wawancara dengan tema yang sama pada sumber yang berbeda.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 2 Bantul

Beers (2009) dalam Buku Induk Gerakan Literasi Sekolah menyampaikan bahwa praktik

yang baik dalam gerakan literasi sekolah menekankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat diprediksi.
Sekolah memilih strategi pembiasaan dan pembelajaran literasi yang tepat sesuai kebutuhan perkembangan mereka. SMA N 2 Bantul menerapkan prinsip ini dengan menentukan program yang disesuaikan dengan tingkatan siswa. Untuk tahap pembiasaan, siswa kelas X biasa melakukan kegiatan-kegiatan yang sarat akan pembiasaan literasi. Dengan melakukan pembelajaran di perpustakaan dan terdapat pojok baca di setiap kelas agar siswa lebih dekat dengan sumber literasi.
2. Program literasi yang baik bersifat berimbang.
Strategi membaca dan jenis teks yang dibaca perlu divariasikan dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Di SMA N 2 Bantul menerapkan prinsip ini melalui program *reading group*. Membaca bersama, menceritakan kembali hasil bacaan. Hal ini menjadi strategi menumbuhkan budaya membaca yang divariasikan. Selain itu, adanya *leveling* buku didalam perpustakaan juga merupakan upaya sekolah untuk menerapkan program literasi yang baik dan berimbang.
3. Program literasi terintegrasi dengan kurikulum.
Pembiasaan dan pembelajaran literasi di sekolah adalah tanggung jawab semua guru disemua mata pelajaran sebab pembelajaran mata pelajaran apapun membutuhkan bahasa, terutama membaca dan menulis. Sama halnya dengan program literasi yang diterapkan di SMA N 2 Bantul. Terdapat beberapa program yang terintegrasi dengan kurikulum sehingga budaya literasi secara profesional dikembangkan diseluruh mata pelajaran.
4. Kegiatan membaca dan menulis dilakukan kapanpun dan dimanapun.
Adanya pojok baca, mading, dan perpustakaan merupakan penerapan dari prinsip tersebut. Siswa dengan mudah mengakses buku sebagai sumber literasi. Bahkan adanya pojok baca, akan semakin mendekatkan anak-anak

dengan buku. Sehingga anak-anak akan terbiasa dengan budaya membaca.

Agar sekolah mampu menjadi garis depan dalam pengembangan budaya literasi, Beers, dkk (2009) dalam buku *A principal's Guide to Literacy Instruction*, menyampaikan beberapa strategi untuk menciptakan budaya literasi yang positif di sekolah, itu:

a. Mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi.

Lingkungan fisik perlu terlihat ramah dan kondusif untuk pembelajaran. Sekolah yang mendukung pengembangan budaya literasi sebaiknya memajang karya peserta didik di area sekolah. Hal tersebut terlihat di Perpustakaan Prapanca yang telah memajang karya-karya peserta didik di area Perpustakaan. Selain itu, peserta didik dapat mengakses buku dan bahan bacaan lain di sudut baca kelas, kantor, dan area lain di sekolah. di SMA N 2 Bantul sudah terdapat pojok baca di setiap kelas dan tersebar di seluruh area sekolah.

b. Mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan interaksi yang literat.

Hal itu dapat dikembangkan dengan pengakuan atas capaian peserta didik sepanjang tahun. Pemberian penghargaan dilakukan ketika upacara bendera setiap minggu kepada siswa. Bukan hanya saat upacara bendera saja, pemberian penghargaan juga terjadi di dalam kelas. Prestasi yang dihargai bukan hanya akademik saja, tetapi juga sikap peserta didik. Prestasi yang berkaitan dengan budaya literasi yang telah diterapkan di SMA N 2 Bantul adalah duta literasi yang memberikan penghargaan bagi siswa yang paling rajin mengunjungi dan membaca di perpustakaan pada periode tertentu.

c. Mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat.

Kebijakan ini dapat terlihat dari perencanaan dan pelaksanaan gerakan literasi di sekolah. Sekolah sebaiknya memberikan alokasi waktu yang cukup

banyak untuk pembelajaran literasi. Tergambar dalam kurikulum sekolah yang sudah mengalokasikan program untuk kegiatan penulisan cerpen, resensi, cipta dan baca puisi, musikalisasi puisi, festival literasi dan kegiatan-kegiatan yang berasal dari program turunan perpustakaan yang mengacu pada buku gerakan literasi sekolah untuk membudayakan gerakan literasi.

Pemaparan diatas merupakan gambaran dari budaya literasi yang tumbuh di SMA N 2 Bantul. Tentunya untuk menciptakan budaya literasi dibutuhkan program-program yang menunjang tumbuhnya budaya tersebut di sekolah. Untuk pencapaiannya yang optimal, kebijakan harus dibuat secara matang dan terintegrasi pada kurikulum sekolah.

5. Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 2 Bantul

Berdasarkan program-program yang telah disampaikan diatas, maka diperlukannya beberapa aspek yang mendukung pelaksanaan program tersebut. berdasarkan teori Edward III sebagaimana dikutip oleh Subarsono (2011: 90-92) menyatakan bahwa suatu putusan kebijakan tanpa implementasi tidak akan mencapai kesuksesan. Edward menyatakan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi berkaitan dengan sosialisasi tentang kebijakan kepada organisasi dan/atau publik serta para agen pelaksana yang terlibat. Koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan oleh agen pelaksana sesuai dengan syarat implementasi bahwa pelaksanaan kebijakan memerlukan adanya koordinasi yang kuat antar berbagai agen atau lembaga implementor dan memerlukan dukungan dari seluruh pihak baik internal maupun eksternal (Sudiyono, 2007: 93-97). Sedangkan di SMA Negeri 2 Bantul, sosialisasi program dilakukan melalui:

- 1) Rapat kerja yang diikuti oleh seluruh elemen sekolah baik guru, kepala sekolah, kepala perpustakaan, koordinator literasi dan seluruh karyawan. Rapat kerja ini biasa dilakukan diawal semester. Rapat kerja berfungsi untuk menentukan program-program yang akan dilakukan di semester selanjutnya dan mensosialisasikan apa saja peran dari masing- masing agen yang ada di sekolah.
 - 2) Rapat tim literasi sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, kepala perpustakaan, kurikulum, kesiswaan, guru, tata usaha, dan beberapa staff yang berkaitan dengan manajemen sekolah. Rapat manajemen dilaksanakan sesuai dengan kebutuhannya. Tidak ada alokasi waktu kapan diadakan rapat manajemen, tetapi intensitas rapat manajemen masih lebih banyak jika dibandingkan dengan rapat kerja.
 - 3) Surat pemberitahuan kepada orangtua. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan pihak sekolah agar orangtua terlibat aktif dalam tercapainya tujuan dari sekolah. Orangtua juga dituntut untuk mendukung program yang diselenggarakan sekolah.
 - 4) Sosialisasi juga dilakukan melalui website sekolah. Dalam pelaksanaannya website sekolah dioperasikan secara optimal sehingga postingan-postingan di website dapat diupdate secara rutin.
 - 5) Penyebaran poster dan karya siswa khusus untuk kegiatan-kegiatan dari perpustakaan agar seluruh elemen sekolah mengetahui program apa yang akan diselenggarakan.
 - 6) Sosialisasi juga dilakukan melalui postingan poster via media sosial berupa whatsapp dan youtube. Sekolah memiliki beberapa grup whatsapp yang melibatkan pihak-pihak terkait. Grup tersebut terdiri dari grup yang berisi seluruh guru dan karyawan, grup orangtua siswa berdasarkan kelas, dan grup para guru. Hal ini dapat memudahkan sekolah untuk penyebaran informasi. Intensitasnya ditentukan oleh jenis sosialisasi yang dilakukan.
 - 7) Perjanjian kerjasama dengan berbagai instansi dan pengimbasan sekolah sekitar merupakan sebuah upaya untuk melebarkan sayap-sayap literasi
Hal ini dilakukan agar seluruh elemen sekolah memahami tentang suatu kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Aktivitas rapat bukan hanya sarana untuk mensosialisasikan program saja, tetapi juga mengkordinasikan apa yang menjadi pendukung dan penghambat berjalannya sebuah kebijakan. Dalam implementasinya, di SMA Negeri 2 Bantul telah tersedia sarana untuk mengkomunikasikan segala kebijakan kepada pihak-pihak yang terkait.
- b. Sumber Daya
- Aspek ini berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk pelaksanaan program agar dapat berjalan dengan baik. Sumber daya tersebut meliputi:
- 1) Sumber daya manusia
Menurut Sabatier dan Mazmanian implementasi dilakukan dengan menunjuk orang-orang atau lembaga yang memiliki orientasi kebijakan yang sejalan dengan kebijakan (Sudiyono,2007:93-97). Sehingga diperlukan sumber daya manusia untuk mendukung berjalannya sebuah kebijakan. Sumber daya manusia atau agen pelaksana adalah orang-orang yang memberikan dukungan terhadap kebijakan serta memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan. Sumber daya manusia yang terlibat untuk mendukung kebijakan GLS di SMA Negeri 2 Bantul adalah seluruh warga sekolah baik kepala sekolah, koordinator literasi, kepala perpustakaan, guru, karyawan, siswa, dan orangtua siswa. Agar memiliki komitmen yang baik, dalam proses seleksi karyawan dan guru, Pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah memberikan kesempatan pada para guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan-kegiatan diklat, workshop, seminar dan studi lanjut sehingga pandangan

yang luas terhadap dunia pendidikan, memiliki kreativitas dan motivasi kerja. Sehingga diharapkan tercipta guru-guru serta karyawan yang memiliki komitmen bersama untuk mencapai visi misi dan tujuan sekolah.

2) Sumber Dana

Salah satu syarat pelaksanaan kebijakan yang dikemukakan oleh Sabatier dan Mazmanian adalah tersedianya sumber dana. Sumber daya keuangan yang dimaksud adalah untuk melaksanakan kebijakan harus mencukupi, baik keperluan gaji, staff, analisis teknis, perizinan, dan monitoring kebijakan (Sudiyono, 2007: 93-97). Pihak sekolah SMA N 2 Bantul mengalokasikan dana sesuai dengan programnya masing-masing. Baik itu program yang bersifat kegiatan maupun penyediaan sumber informasi literasi. Alokasi dana ini digunakan untuk program-program yang menunjang budaya literasi. Sumber dana berasal dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang nantinya akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sumber literasi berupa pengadaan buku, pengembangan perpustakaan. Sehingga implementasi kebijakan ini didukung oleh sumber dana yang memadai.

3) Alokasi Waktu

Lineberry (1978) menyampaikan bahwa salah satu komponen dalam pelaksanaan kebijakan adalah harus mengalokasikan sumber daya termasuk sumber daya waktu untuk memperoleh dampak kebijakan (Sudiyono, 2007: 80-81). Pihak sekolah sudah mengalokasikan waktu khusus sebagai upaya untuk peningkatan literasi siswa. Alokasi waktu yang disediakan terintegrasi dalam pembelajaran sekolah disetiap harinya dan/ atau sesuai dengan bulan yang sudah ditentukan. Hal ini guna memperoleh dampak kebijakan yang sesuai dengan tujuan. Ada beberapa program yang terintegrasi dari kurikulum sekolah seperti membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai yang terintegrasi dari mata pelajaran bahasa dan berlaku untuk seluruh kelas dan diselenggarakan disetiap pagi sebelum dimulainya jam belajar dan kegiatan

ekstrakurikuler di luar jam pelajaran untuk mengembangkan budaya literasi. Sehingga dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan program-program sekolah di SMA Negeri 2 Bantul telah mengalokasikan waktu untuk mengimplementasikan kebijakan gerakan literasi sekolah.

c. Disposisi

Komitmen dari agen-agen memiliki pengaruh yang kuat dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Para pelaku kebijakan harus memiliki kemampuan manajerial, dan komitmen terhadap tujuan yang akan dicapai (Sudiyono, 2007: 90). Agen-agen yang terlibat sangat berkomitmen dengan program yang dibuat.

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan bahwa seluruh warga turut aktif mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dalam menunjang kemampuan manajerial agen pelaksana, pihak sekolah memberikan fasilitas berupa melibatkan guru untuk mengikuti seminar, pelatihan, bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh instansi tertentu agar para agen pelaksana kebijakan di sekolah mempunyai kecakapan terkait kebijakan yang sudah ditetapkan. Sehingga diharapkan dapat mencetak guru-guru serta karyawan yang memiliki komitmen bersama untuk mencapai visi misi dan tujuan sekolah.

d. Struktur Birokrasi

Organisasi pelaksana menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, dan aturan main organisasi. Sejalan dengan apa yang disampaikan Lineberry (1978) bahwa komponen implementasi perlu menciptakan dan menyusun staff sebuah agen baru untuk melaksanakan kebijakan (Sudiyono, 2007: 8-081). Garis struktur birokrasi kebijakan terkait literasi sekolah adalah dari koordinator literasi akan menyampaikan program yang diusulkan untuk kemudian disetujui oleh kepala sekolah. Program yang sudah disetujui kemudian disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait agar diberikan arahan dan SOP (*Standart*

Operational Procedure) dari program yang akan dilaksanakan.

Dari paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan gerakan literasi sekolah, SMA Negeri 2 Bantul telah didukung oleh sumber daya manusia berupa agen-agen yang terlibat untuk mengimplementasikan kebijakan, alokasi dana dari berbagai sumber pemasukkan, dan alokasi waktu untuk mengimplementasikan kebijakan atau program tersebut.

6. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah SMA Negeri 2 Bantul

Suatu implementasi kebijakan akan menghasilkan keberhasilan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut apabila memenuhi indikator. Arif Rohman (2009:147) menyatakan, bahwa ada 3 faktor yang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak. Untuk faktor ini, sekolah telah membuat SOP (*Standart Operational Procedure*) terkait gerakan literasi sekolah yang mengacu pada buku panduan gerakan literasi sekolah. Hal tersebut menjadi upaya sekolah untuk dapat membantu seluruh elemen sekolah dalam memahami program yang telah ditetapkan. SOP yang dibuat dapat dijadikan sebagai panduan untuk menjalankan program.
- b. Faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masing-masing. Semua itu akan sangat mempengaruhi cara kerja agen

pelaksana secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan. Terlihat bahwa guru memiliki komitmen yang baik terhadap kebijakan tersebut. hal ini telah disampaikan oleh subjek penelitian terkait sumber daya. Guru SMA Negeri 2 Bantul, sangat memprioritaskan kemampuan, komitmen, dan motivasi belajar yang baik sehingga hal tersebut dapat membantu berjalannya program tanpa hambatan.

- c. Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih. Berkaitan dengan hirarki kewenangan, dalam pelaksanaan kebijakan gerakan literasi sekolah berada ditangan kepala sekolah secara langsung. Gaya kepemimpinan dari kepala sekolah SMA Negeri 2 Bantul adalah terbuka dengan segala masukan. Artinya seluruh elemen sekolah mempunyai hak untuk memberikan saran terkait kebijakan tersebut. terdapat program monitoring untuk melihat ketercapaian dari program-program yang telah ditetapkan. Evaluasi juga dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan sebuah program.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Program yang menunjang kebijakan gerakan literasi di SMA Negeri 2 Bantul adalah sebagai berikut: kegiatan lomba penulisan cerpen, lomba resensi, lomba cipta baca puisi, musikalisasi puisi, perpustakaan kelas, sudut baca, waqaf buku, festival literasi dan tidak kalah penting lomba perpustakaan kelas.
2. Untuk meningkatkan semangat para siswa, penghargaan duta literasi diberikan pada siswa yang paling banyak membaca buku dalam periode tertentu.

3. Pelaksanaan kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 2 Bantul ialah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Sosialisasi program dilakukan melalui rapat kerja, rapat tim pengembang literasi, perjanjian kerjasama dengan instansi terkait, pengimbasan ke sekolah sekitar, surat pemberitahuan kepada orangtua, website sekolah, penyebaran poster, dan melalui postingan poster via media sosial berupa whatsapp dan Youtube.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang terlibat untuk mendukung kebijakan GLS ini adalah seluruh warga sekolah baik kepala sekolah, guru, koordinator literasi, kepala perpustakaan, karyawan, instansi terkait, siswa, komite sekolah dan masyarakat sekitar.

c. Sumber Dana

Pihak sekolah mengalokasikan dana sesuai dengan programnya masing-masing. Baik itu program yang bersifat kegiatan maupun penyediaan sumber informasi literasi. Alokasi dana berasal dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan pihak sponsor.

d. Alokasi Waktu

Pihak sekolah sudah mengalokasikan waktu khusus sebagai upaya untuk peningkatan literasi siswa dengan mengintegrasikan kedalam kurikulum pada setiap mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan budaya literasi.

e. Disposisi

Agen-agen yang terlibat sangat berkomitmen dengan program yang dibuat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan bahwa seluruh warga turut aktif mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pihak sekolah memberikan fasilitas berupa melibatkan guru untuk mengikuti seminar, pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh instansi tertentu agar para pelaksana

kebijakan di sekolah mempunyai kecakapan terkait kebijakan yang sudah ditetapkan.

f. Struktur Birokrasi

Garis struktur birokrasi kebijakan terkait literasi sekolah adalah dari koordinator literasi yang akan menyampaikan program yang diusulkan untuk kemudian disetujui oleh kepala sekolah. Program yang sudah disetujui kemudian disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait agar diberikan arahan dan SOP (Standar Operational Procedure) yang mengacu pada buku panduan gerakan literasi sekolah dari program yang akan dilaksanakan.

4. Faktor Pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di SMA Negeri 2 Bantul.

Adanya sarana untuk mensosialisasikan kebijakan atau program dari sekolah, perkembangan media masa juga sangat membantu, adanya hibah buku atau wakaf buku dari orangtua dan guru, selain itu sekolah juga mengalokasikan waktu dan dana, guru-guru mempunyai semangat belajar yang baik, adanya alokasi dana untuk membuat poster, pamflet, baliho, dan surat edaran untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, selain itu, adanya mahasiswa PPL juga membantu pelaksanaan program-program perpustakaan, semua warga sekolah terlibat aktif dalam implementasi program yang dibuat oleh perpustakaan. Sedangkan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi di SMA Negeri 2 Bantul adalah jenis buku yang kaya nilai-nilai pendidikan serta pengetahuan yang aktual dan menarik sulit didapatkan di Indonesia, setiap guru memiliki tugas utamanya masing-masing sehingga guru-guru tentunya lebih memprioritaskan tugas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Akib, Haedar. *Jurnal Administrasi Publik. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Vol 1 No. 1 Thn. 2010. Hal 1-4. Makasar : UNM.
2. Anshori, El T. Yuli, Enceng dan Karyana, A. *Kebijakan Publik yang Partisipatif dan Komunikatif*. Vol 3 No 2 Thn 2012 Hal 75. Banten : Universitas Terbuka.
3. Antoro, Billy. (2017). *Gerakan Literasi Sekolah dari Pucuk Hingga Akar Sebuah Refleksi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Asyhari, Ardian dan Hartati, Risa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika 'Al-Biruni'. Profil Peningkatan Kemampuan Literasi Sains Siswa Melalui Pembelajaran Saintifik*. Vol 4 No 2 Thn 2015. Hal 179. Lampung : IAIN Raden Intan.
5. Suharsimi. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
6. Suragangga, I Made Ngurah. *Jurnal Penjaminan Mutu. Mendidik Lewat Literasi Untuk Pendidikan Berkualitas*. Vol 3 No 3 Thn. 2017. Hal 49. Denpasar : Institut Hindu Dharma Negeri.
7. Suryaman, Maman. *LITERA. Analisis Hasil Belajar Peserta Didik dalam Literasi Membaca Melalui Studi Internasional (PIRLS) 2011*. Vol 14 No 1 Thn 2015. Hal 171. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
8. Beers, C. S. (2009). *A Principal's Guide to Literacy Instruction*. New York: Guilford Press.
9. Fatih, Andy Al. (2010). *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Unpad Press.
10. Ferguson, B. *Information Literacy. "A Primer for Teachers, Librarians, and other Informed People"*. Diakses dari www.bibliotech.us/pdfs/InfoLit.pdf. Pada tanggal 20 November 2017.
11. Gipayana, Muhana. *Jurnal Ilmu Pendidikan. Pengajaran Literasi dan Penilaian Portofolio dalam Konteks Pembelajaran Menulis di SD*. Jilid 11 No 1 Thn 2004. Hal 2. Malang : Universitas Negeri Malang.
12. Kemendikbud. (2016). *Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
13. Kemendikbud. (2016). *Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
14. Moleong, Lexy J. (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya.
15. Musfiroh, Tadkiroatun dan Listyorini, Beniati. *LITERA. Konstruksi Kompetensi Literasi untuk Siswa Sekolah Dasar*. Vol 15 No 1 Thn 2016. Hal 2. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
16. Rina, Setyati dan Warsito, Utomo. *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru*. Vol 19 No.1 Thn. 2015 Hal 61. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
17. Rohman, Arif. (2014). *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
18. Setiawan, Guntur. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka
19. Solichin, Abdul Wahab. (2014). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
20. Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
21. Sudiyono. (2007). *Buku Ajar: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: UNY.
22. Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
23. UNESCO. 2003. *The Prague Declaration. "Towards an Information Literate Society"*. Diakses dari: www.unesco.com. Pada tanggal 20 November 2017.
24. Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
25. Yuliati. *Jurnal Ilmu Pendidikan. Model Budaya Baca-Tulis Berbasis Balance Literacy dan Gerakan Informasi Literasi SD*. Jilid 20 No 1 Thn 2014